



Triwidyawati

KONGRES PANCASILA III

**"HARAPAN, PELUANG DAN TANTANGAN
PEMBUDAYAAN NILAI-NILAI PANCASILA"**

Surabaya, 31 Mei - 1 Juni 2011

Diselenggarakan oleh:



Universitas Airlangga



Majelis Pemusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia



Universitas Gadjah Mada

MEMBUDAYAKAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI*

Triwahyuningih

(dosen PPKN Universitas Ahmad Dahlan)

Tatkala Perguruan Tinggi berlomba-lomba meraih *world class university* dan Pancasila tidak lagi tercantum dalam kurikulum mayoritas Perguruan Tinggi, demikian hasil survey yang diadakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terhadap 81 PTN maka sebenarnya pada saat yang sama kita sedang membiarkan diri kita tererabut dari akar budaya sendiri.

Kampus harus dijadikan pelopor untuk membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pendidikan karakter. Yang harus dilakukan adalah (1) *knowing the good*, mahasiswa tidak hanya tahu tentang hal-hal baik yang ada dalam nilai-nilai Pancasila tetapi mereka harus paham mengapa melakukan itu; (2) *feeling the good*, membangkitkan rasa cinta mahasiswa untuk melakukan hal-hal yang baik, dilatih untuk merasakan efek dari perbuatan baik yang dilakukan; (3) *acting the good*, mahasiswa dilatih untuk berbuat mulia, berbuat sesuatu yang baik harus dilatih.

Permasalahannya adalah bagaimana "membumikan" nilai-nilai Pancasila di perguruan Tinggi. Butir-butir P4 yang tidak relevan dengan konstitusi (Amandemen I, II, III, IV) di drop atau membuat yang baru sama sekali, model pembelajaran seperti apa, dosen pengampu yang memiliki *knowledge, feel/attitude dan skill* yang baik tentang Pancasila. Terakhir tentu dibutuhkan keseriusan pemerintah untuk "menghidupkan" kembali ideologi Pancasila yang sudah layu sekian lama.

1. Pendahuluan

Bung Karno pernah berpesan kepada kita: Bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter (*character building*), karena pembangunan karakter inilah yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju dan jaya serta bermartabat. Kalau pembangunan karakter ini tidak dilakukan (atau salah melaksanakannya), maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli" (Soemarno Soedarsono, 2009: sampul). Marilah kita renungkan pesan Bung Karno itu dengan menyimak realitas kehidupan masyarakat bangsa dan Indonesia.

Karakter atau watak memiliki potensi yang besar untuk mempengaruhi pola pikir, perasaan dan tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Karakterlah yang menentukan bagaimana bentuk kontribusi seseorang individu baik terhadap perkembangan diri, keluarga dan lingkungan maupun bangsa dan negara (Seto Mulyadi, Kedaulatan Rakyat, 20 Februari 2011).

Penyelenggaraan pendidikan Pancasila di Perguruan tinggi menjadi keharusan karena Perguruan tinggi sebagai agen perubahan yang melahirkan intelektual-intelektual muda kelak yang menjadi inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa.

Akhir-akhir ini kalangan birokrat, pendidik, orang tua dan generasi muda Indonesia resah, khawatir dan kecewa karena adanya krisis keteladanan (Kompas, Komaruddin Hidayat, 2001 : 6). Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara semestinya jadi *living values* masyarakat Indonesia sehari-hari, masih jauh dari harapan. Setiap sila Pancasila semestinya menjadi tolok ukur prestasi kebijakan pemerintah. Ditambah di tingkat satuan pendidikan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dihapus menjadi hanya Pendidikan Kewarganegaraan di semua jenjang pendidikan membawa konsekuensi ditinggalkannya nilai-nilai Pancasila, seperti musyawarah, gotong royong, kerukunan dan toleransi beragama. (Kompas, 6 Mei 2011 : 1). Itu artinya nilai-nilai Pancasila nyaris hilang di sekolah-sekolah (Kompas, 12 Mei 2011). Pendidikan mestinya tempat untuk menyemai nilai-nilai karakter agar generasi tumbuh sebagai manusia "seutuhnya" yang berpegang pada nilai-nilai Pancasila.

Remaja saat ini tumbuh tanpa pemahaman yang dalam tentang ideologi berbangsa yang menjadi jatidiri dan acuan visi ke depan di tengah pergaulan dan persaingan global. Generasi mendatang dituntut memahami dan menjaga multikulturalisme dan pluralisme yang menjadi realitas sosial bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dan sebagai dasar negara disarikan dari nilai-nilai agama, adat istiadat atau tradisi yang hidup ditengah masyarakat Indonesia seperti kerukunan, musyawarah, gotong royong, rela berkorban dan nilai-nilai luhur lain terbukti efektif menyatukan bangsa ini (Azyumardi Azra, Kompas 7 Mei 2011 : 1). Bahkan dalam diskusi dan Deklarasi Akademisi Pengawal Pilar Bangsa (APPi Bangsa) mengatakan pengabaian nilai-nilai Pancasila dilakukan secara sadar dan sistematis oleh pemerintah demi tujuan sesaat (Kompas, 10 Mei 2001 : 1).

Kongres Pancasila III
Surabaya, 31 Mei – 1 Juni 2011

Oleh karena itu tema Hari Pendidikan Nasional tahun 2011 ini Kementerian Pendidikan Nasional mengusung tema "Pendidikan Karakter sebagai Pilar Kebangkitan Bangsa". Bahkan pada tanggal 20 Mei 2011 Kementerian Pendidikan Nasional akan melakukan *launching* "pendidikan karakter untuk menjawab problem kepribadian" di mana anak generasi penerus kita kurang mengenal ajaran dasar pendidikan nasional kita dilihat dari aspek karakter dan watak (Suyanto, Kedaulatan Rakyat 8 Mei 2011 : 1). Permasalahannya adalah bagaimana menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila yang sudah sekian lama terabaikan sebagai pendidikan karakter di Perguruan tinggi?

2. Urgensi Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi

Walaupun UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tetap mencantumkan ideologi dasar Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional, peraturan pelaksanaannya tidak lagi mencantumkan pendidikan ideologi negara dalam kurikulum pendidikan nasional. Akibat dan penghapusan tersebut sangat mengawatirkan. Suatu survey yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terhadap 81 PTN mengungkapkan Pancasila tidak tercantum dalam mayoritas PT. karenanya proses "*colonialization of the mind*" secara tidak disadari menjadi semakin marak dan pendidikan tinggi yang "Salah Asuhan" berlangsung tanpa hambatan, menghasilkan para lulusan yang lebih menghayati paradigma ilmu pengetahuan milik budaya bangsa lain daripada ilmu pengetahuan yang berakar dan budaya bangsa sendiri (Sofian Affendi, 2006 : xiv).

Dalam pengembangan Pancasila kampus harus selalu berada di baris depan, menjadi pelopor bagi bangsa ini dalam menghadapi gelombang globalisasi yang semakin besar dan semakin ditunggangi oleh semangat neokapitalisme dan fundamentalisme pasar. Bung Karno, kampus harus bangkit mengembangkan pemikiran-pemikiran untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar ontologis, epistemologis dan aksiologis dari ilmu pengetahuan yang kontekstual Indonesia. Sejalan dengan itu kampus juga harus memelopori pemikiran-pemikiran untuk mengembangkan filsafat bangsa Indonesia tersebut sebagai paradigma pembangunan dan sebagai landasan etik pembangunan nasional.

Sebagai warga negara yang boleh disebut terpelajar, rasanya kita patut menyesalkan bahwa di masa lalu Pancasila pernah diletakkan sebagai "pseudo-agama" yang berarti tertutup terhadap kritik dan difungsikan secara tunggal, sebagai legitimasi kekuasaan. Pancasila telah menjadi instrument utama bagi yang memegang kekuasaan dengan cara yang represif dan otoriter. Maka barang siapa berseberangan dengan penguasa, atau melakukan kritik terhadap Pancasila mengalami berbagai distorsi dan bahkan "krisis legitimasi" didepan para pendukungnya sendiri. Apa akibat yang ditimbulkannya? Berbagai difungsi penerapan Pancasila dan bahkan sikap sinisme mulai melanda sebagian kalangan di antara kita. Sikap semacam itu mudah dipahami, karena sesungguhnya kemampuan sebagai ideologi tidak terletak pada retorika politiknya, tetapi lebih pada kemampuannya dalam mengatasi dan memecahkan masalah bangsa secara nyata (Umar Anggara Jenie, 2006 : xiii). Fase Pancasila di rezim Soeharto telah menjadi rekayasa yang melahirkan dampak tak terbayangkan. Selain gagal memaksa rakyat Indonesia melupakan Soekarno, pemerintahan Soeharto melahirkan trauma kolektif atas politisasi Pancasila dan "kapok massal" tersebut telah melahirkan gugatan depolitisasi. Pancasila dipersoalkan secara formal, meskipun secara substantif merupakan konstruksi ideal filosofis sebagai ideologi negara (Halili, 2011 : 6).

Sebaliknya semangat romantisasi untuk mengembalikan Pancasila secara murni dan konsekuen juga mulai bergairah lagi. Meskipun wacana "mempersoalkan" Pancasila sebagai ideologi negara terasa kurang produktif, sebagai masyarakat yang sedang menyempurnakan proses demokrasi, suasana seperti itu tentu tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan, apa yang kita butuhkan kedepan, disamping belajar dari kesalahan masa lalu, adalah melakukan revitalisasi: bagaimana nilai-nilai karakter yang ada pada Pancasila benar-benar mampu menjadi landasan dan pegangan dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bangsa, terutama dalam menghadapi krisis multi-dimensi yang sampai sekarang masih terasa berkepanjangan. Bagaimana agar Pancasila tidak sekedar merupakan daftar keinginan normative yang bertumpu pada apa yang seharusnya (das sollen), tetapi kosong dan tindakan yang konsisten. Cara paling efektif adalah dimasukkannya Pendidikan Pancasila sebagai Pendidikan Karakter di sekolah dari sekolah dasar sampai Perguruan Tinggi.

Menurut Kaelan (2006: 12-15) landasan Pendidikan Pancasila di perguruan Tinggi adalah landasan historis, kultural, yuridis dan landasan filosofis. *Pertama*, landasan historis, bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang sejak jaman kerajaan kutai sriwijaya. Setelah melalui proses yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia

menemukan jati dirinya, yang di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain, yang oleh para pendiri negara kita dirumuskan dalam suatu rumusan yang sederhana namun mendalam, yang meliputi lima prinsip (lima sila) yang kemudian diberi nama Pancasila. Dalam berbangsa dan bernegara dewasa ini terutama dalam masa reformasi, bangsa Indonesia sebagai bangsa harus memiliki visi serta pandangan hidup yang kuat agar tidak terombang-ambing di tengah-tengah masyarakat internasional. Dengan lain perkataan bangsa Indonesia harus memiliki nasionalisme serta rasa kebangsaan yang kuat. Hal ini dapat terlaksana bukan melalui suatu kekuasaan atau hegemoni ideologi melainkan suatu kesadaran berbangsa dan bernegara yang berakar pada sejarah bangsa.

Kedua, landasan cultural. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada suatu asa cultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah hanya merupakan suatu hasil konseptual seseorang saja melainkan merupakan suatu hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai cultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri, yang melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara seperti Soekarno, M. Yamin, M. Hatta, Soepomo serta para tokoh pendiri bangsa lainnya. *Ketiga*, landasan yuridis sebagaimana tertuang dalam UUN. 20 /2003 tentang tentang Sistem pendidikan Nasional, Pasal (2) “ Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945” walaupun peraturan pelaksanaannya tidak lagi mencantumkan pendidikan ideologi negara dalam kurikulum pendidikan nasional.

Keempat, landasan filosofis. Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu sudah merupakan keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berdasarkan pada suatu kenyataan secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila yang secara filosofis merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara.

Ideologi Pancasila memiliki karakter utama yaitu sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. *Ia adalah cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena ia digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun negara bangsa Indonesia.* Pancasila yang memberi pedoman dan pegangan bagi tercapainya persatuan dan kesatuan di kalangan warga bangsa dan membangun pertalian batin antara warga negara dengan tanah airnya.

Sebagai Dasar Negara. Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum nasional sehingga memiliki peran mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan landasan yang kokoh bagi hukum dasar yaitu Pembukaan dan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 serta segala ketentuan yang mengatur segenap aktifitas kenegaraan. Di dalam peran dan fungsinya ini, terdapat nilai-nilai dasar, nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai praksis Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila sebagai dasar negara terdapat pada Pembukaan dan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terkandung kaidah-kaidah dan tatanan dasar dari sendi-sendi kehidupan bernegara.

Nilai instrumental Pancasila bila dilihat dari prosesnya merupakan konkretisasi dari nilai dasar yang umumnya telah dituangkan dalam bentuk norma-norma berupa produk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, dan Peraturan pelaksanaannya. Nilai praksis Pancasila dilihat dari prosesnya merupakan interaksi antara instrumental dengan realita yang ada pada waktu dan situasi tertentu. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam nilai-nilai praksis yaitu cara-cara bagaimana bangsa Indonesia melaksanakan nilai-nilai instrumenal secara fleksibel dan adaptif sesuai dengan perkembangan zaman sehingga pada dasarnya Pancasila merupakan Ideologi yang terbuka.

Sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila adalah landasan moral dan etika bagi setiap warga negara Indonesia untuk hidup damai dan selaras dalam diri maupun bersama lingkungannya. Pancasila mengatur sikap dan tingkah laku setiap individu Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, tanah air, nusa dan bangsa dalam seluruh aspek kehidupan. Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia merupakan pandangan hidup atau “*Way Of Life*” yang berguna sebagai petunjuk hidup untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional.

2. Konsep Pendidikan Karakter

Kongres Pancasila III
Surabaya, 31 Mei – 1 Juni 2011

Pendidikan karakter adalah pendidikan untuk “membentuk” kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras dan lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan sesuatu perangkat untuk mengembangkan dan membina kebiasaan positif yang ada dalam diri peserta didik karena pada hakikatnya dalam diri manusia terdapat modal dasar untuk berbuat kebajikan (Prayoga Bestari, 2010 : 155).

Selama ini banyak terlintar kritik bahwa penyelenggaraan pendidikan kita telah kehilangan moral pendidikan (ALPTKI, 2009: 2). Oleh karena itu pendidikan karakter di lembaga pendidikan sebagai sesuatu yang tidak dapat di tawar. Secara konseptual istilah pendidikan karakter ini sering disamakan dengan pendidikan nilai, pendidikan religious, pendidikan pekerti, pendidikan akhlak mulia, pendidikan moral (Samsuri, 2009: 1 dan lihat Darmiyanti Zuchdi, 2008: 5).

Pendidikan karakter, pendidikan moral, atau pendidikan budi pekerti itu dapat dikatakan sebagai proses untuk penyempurnaan diri manusia, merupakan usaha manusia untuk menjadikan dirinya sebagai manusia yang berakhlak mulia, manusia yang berkeutamaan (Doni Koesma A., 2007: 81). Dikatakan manusia berkeutamaan maka pada diri manusia itu mengalir kebiasaan-kebiasaan atau perilaku baik sebagai hasil dari proses internalisasi nilai-nilai utama, atau nilai-nilai positif seperti keyakinan kepada Sang Pencipta, jujur, saling menghormati antar sesama, peduli, sabar dan berlaku santun, percaya diri, tahan uji dan bermoral tinggi, tertib dan disiplin, demokratis dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian pendidikan karakter merupakan proses pembudayaan dan pemanusiaan.

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 20 th 2003, nilai-nilai karakter yang harus dikembangkan adalah: 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Berakhlak mulia; 3) Sehat; 4) Berilmu; 5) Cakap; 6) Kreatif; 7) Mandiri; 8) Demokratis; 9) Bertanggung jawab.

Dalam Desain Induk Pembangunan Karakter bangsa tahun 2010-2025 disebutkan bahwa pendekatan dalam pembentukan karakter meliputi: 1) Pendekatan interventif, dikembangkan suasana interaksi belajar dan pembelajaran yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan pembentukan karakter dengan menerapkan kegiatan terstruktur. Agar proses pembelajaran tersebut berhasil guna, peran guru sebagai sosok panutan penting menentukan; 2) Pendekatan habituasi, diciptakan situasi dan penguatan yang memungkinkan peserta didik pada satuan pendidikannya, di rumahnya, di lingkungan masyarakatnya membiasakan diri berperilaku dan dipersonalisasi dari dan melalui proses intervensi. (Depdiknas, 2010)

Pendidikan Budi Pekerti/pendidikan karakter dalam kurikulum Sekolah mengalami pasang surut. Pendidikan budi pekerti/pendidikan karakter pertamakali diperkenalkan dalam Kurikulum 1947 sebagai mata pelajaran tersendiri; pada Kurikulum 1964 disatukan menjadi pelajaran agama/budi pekerti; pada Kurikulum 1968 pendidikan budi pekerti hilang, baik sebagai nama mata pelajaran tersendiri maupun sebagai mata pelajaran yang diintegrasikan dengan mata pelajaran lain. Kemudian pada Kurikulum 1975 pendidikan budi pekerti sudah tidak muncul lagi, yang muncul adalah mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan mata pelajaran Pendidikan Agama menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. Pada Kurikulum 1984 “Pendidikan budi pekerti dihapuskan dalam daftar mata pelajaran di sekolah”. Pada kurikulum 1994 pendidikan budi pekerti/pendidikan karakter kurang mendapat perhatian. Demikian juga pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006 tidak disebutkan pendidikan budi pekerti sebagai mata pelajaran tersendiri. Kebijakan pemerintah seperti ini berdampak kurang berjalannya pendidikan budi pekerti di sekolah.

Menurut Dr. Ratna Megawangi, dari *Yayasan Indonesia Heritage Foundation*, Ada tiga hal yang harus mendapatkan penekanan lebih dalam menerapkan model pendidikan karakter:

Pertama, “*Knowing the good*” bahwa untuk membentuk karakter, anak tidak hanya sekedar tahu mengenai hal-hal yang baik, namun mereka harus dapat memahami mengapa perlu melakukan hal tersebut. Kedua, “*feeling the good*” konsep ini mencoba membangkitkan rasa cinta anak untuk melakukan perbuatan baik. Di sini anak dilatih untuk merasakan efek dari perbuatan baik yang dia lakukan. Jika *feeling the good* ini sudah tertanam, itu akan menjadi *engine* atau kekuatan luar biasa dari dalam diri seseorang untuk melakukan kebaikan atau mengerem dirinya agar terhindar dari perbuatan negative. Ketiga, “*acting the good*”, pada tahap ini anak dilatih untuk melakukan perbuatan baik. Tanpa melakukan, apa yang sudah diketahui atau dirasakan oleh seseorang tidak akan ada artinya.

Melakukan sesuatu yang baik harus dilatih sehingga akan merupakan/ menjadi bagian dari kehidupan mereka. Jadi ketiga hal di atas harus dilatih secara terus menerus sehingga menjadi kebiasaan. Jadi konsep yang dibangun adalah : "*Habit of the mind, habit of the heart, habit of the hand.*" (Anonim, 2008).

"... pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya **budi pekerti (kekuatan batin, karakter)**, pikiran (*intellect*), dan tubuh anak. Bagian-bagian itu **tidak boleh dipisahkan** agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita.." (*Ki Hajar Dewantara*).

Ada beberapa nilai karakter yang telah dikembangkan oleh Depdiknas, sbb :

1. **Nilai karakter yang berhubungan dengan Tuhan**, yaitu nilai kereligi an (taqwa)

2. **Nilai karakter yang berhubungan dengan diri sendiri**, meliputi :

Jujur; Bertanggungjawab; Bergaya hidup sehat; Disiplin; kerja keras; percaya diri; berjiwa wira usaha; berfikir logis, kritis, kreatif dan inovatif; mandiri; ingin tahu; cinta ilmu.

3. **Karakter yang berhubungan dengan sesama**, meliputi :

Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain; Patuh pada aturan-aturan sosial; Menghargai karya dan prestasi orang lain; Santun; Demokratis.

4. **Nilai karakter yang berhubungan dengan lingkungan**, yaitu :

Peduli lingkungan dan sosial; Nilai kebangsaan ; Nasionalis; Menghargai keberagaman.

3. Tahap Pengembangan karakter

Dalam pendidikan karakter Lickona (1992) menekankan pentingnya tiga komponen karakter yang baik (*components of good character*) yaitu *moral knowing* atau pengetahuan tentang moral, *moral feeling* atau perasaan tentang moral dan *moral action* atau perbuatan bermoral. Hal ini diperlukan agar siswa didik mampu memahami, merasakan dan mengerjakan sekaligus nilai-nilai kebijakan: a) **Moral Knowing**. Terdapat enam hal yang menjadi tujuan dari diajarkannya moral knowing yaitu: 1) *moral awareness*, 2) *knowing moral values*, 3) *perspective taking*, 4) *moral reasoning*, 5) *decision making* dan 6) *self-knowledge*; b) **Moral Feeling**. Terdapat 6 hal yang merupakan aspek dari emosi yang harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia berakarakter yakni: 1) *conscience*, 2) *self-esteem*, 3) *empathy*, 4) *loving the good* 5) *self-control* dan 6) *humanity*; c) **Moral action**. Perbuatan/tindakan moral ini merupakan hasil (*outcome*) dari dua komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik (*act morally*) maka harus dilihat tiga aspek lain dari karakter yaitu: 1) kompetensi (*competence*), 2) keinginan (*will*) dan 3) kebiasaan (*habit*). (Prayoga Bestari, 2010 : 156).

Dengan demikian, pendidikan karakter bukan saja membangun pengetahuan karakter yang baik, namun juga harus dilanjutkan dengan membentuk perasaan dalam diri peserta didik agar memiliki kepekaan rasa terhadap hal-hal yang kurang baik dan dapat mengimplementasikan karakter-karakter yang kurang baik dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, Ratna Megawangi sebagai pencetus pendidikan karakter di Indonesia telah menyusun karakter mulia yang selayaknya diajarkan kepada anak, yang kemudian disebut sebagai 9 pilar yaitu: 1) cinta tuhan dan kebenaran (*love Allah, trust, reverence, loyalty*); 2) tanggung jawab, kedisiplinan dan kemandirian (*responsibility, excellence, self reliance, discipline, orderliness*); 3) Amanah (*trustworthiness, reliability, honesty*); 4) Hormat dan santun (*respect, courtesy, obedience*); 5) kasih sayang, kepedulian dan kerjasama (*love, compassion, empathy, generosity, moderation, cooperation*); 6) Percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah (*confidence, assertiveness, creativity, resourcefulness, courage, determination and enthusiasm*); 7) Keadilan dan kepemimpinan (*justice, fairness, mercy, leadership*); 8) Baik dan rendah hati (*kindness, friendliness, humility, modesty*); 9) Toleransi dan cinta damai (*tolerance, flexibility, peacefulness, unity*).

4. Nilai-nilai karakter yang ada pada Pancasila

Nilai-nilai Karakter ada dalam sila-sila Pancasila :

A. Nilai-nilai Karakter yang berhubungan dengan Tuhan

Sila I. Ketuhanan Yang Maha Esa

(1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

(2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

(3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan

penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

(4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

(5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

(6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

(7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

B. Nilai-nilai Karakter yang berhubungan dengan sesama manusia

Sila II. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

(1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

(2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

(3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.

(4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.

(5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

(6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

(7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

(8) Berani membela kebenaran dan keadilan.

(9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.

(10) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

C. Nilai-nilai karakter yang berhubungan dengan lingkungan

Sila III. Persatuan Indonesia

(1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

(2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.

(3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.

(4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.

(5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

(6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.

(7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

D. Nilai-nilai Karakter yang berhubungan dengan sesama

Sila IV Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

(1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.

(2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

(3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

(4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

(5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.

(6) Dengan i'tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.

(7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

(8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

(9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

(10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

E. Nilai-nilai Karakter yang berhubungan dengan diri sendiri dan sesama

Sila V. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- (1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- (3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- (4) Menghormati hak orang lain.
- (5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- (6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- (7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- (8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- (9) Suka bekerja keras, jujur, disiplin, kerja keras, bertanggung jawab.
- (10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- (11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila jelas sangat lengkap menunjuk nilai-nilai karakter yang berkaitan dengan Tuhan, nilai-nilai karakter dengan diri sendiri atau pribadi orang perorang, dengan sesama dan dengan lingkungan di mana ia berada. Nilai-nilai karakter inilah yang harus secara serius ditanamkan kepada mahasiswa sebagai modal untuk membangun jatidiri yang siap memegang estafet pembangunan di masa yang akan datang.

5. Kesimpulan

Menempatkan pendidikan karakter sebagai sesuatu kekuatan bangsa hal mendesak yang harus dilakukan bangsa ini. Melalui kebijakan dan implementasi pendidikan dengan cara mengangkat kembali nilai-nilai Pancasila sebagai pendidikan karakter di sekolah termasuk Perguruan tinggi. Nilai-nilai karakter yang ada dalam Pancasila disemai kembali di lingkungan Pendidikan dengan merevitalisasi pengampu mata kuliah, metode pembelajaran dan metode pendekatan termasuk sistem evaluasi yang berkesinambungan agar dapat berhasil dengan efektif.

Caranya adalah Pertama, "*Knowing the good*" bahwa mahasiswa harus mengetahui nilai-nilai karakter yang ada dalam sila-sila Pancasila dan mengapa nilai-nilai karakter tersebut perlu dilakukan? Kedua, "*feeling the good*" konsep ini mencoba membangkitkan rasa cinta untuk melakukan perbuatan baik yang ada dalam sila-sila Pancasila tersebut? Di sini mahasiswa dilatih untuk merasakan efek dari perbuatan baik yang dia lakukan. Jika *feeling the good* ini sudah tertanam, itu akan menjadi *engine* atau kekuatan luar biasa dari dalam diri seseorang untuk melakukan kebaikan atau mengerem dirinya agar terhindar dari perbuatan negative. Ketiga, "*acting the good*", pada tahap ini anak dilatih untuk melakukan perbuatan baik. Tanpa melakukan, apa yang sudah diketahui atau dirasakan oleh seseorang tidak akan ada artinya. Melakukan sesuatu yang baik harus dilatih sehingga akan merupakan/ menjadi bagian dari kehidupan mereka. Jadi ketiga hal di atas harus dilatih secara terus menerus sehingga menjadi kebiasaan. Jadi konsep yang dibangun adalah: "*Habid of the mind, habid of the heart, habid of the hand.*"

Daftar pustaka

- Anonym. (2008). Ratna Megawangi, Ir. M.Sc, Ph.D: *Pelopop Pendidikan Holistik Berbasis Karakter*. Tersedia [Online]
<http://www.jugaguru.com/tokoh/41/tahun/2008/bulan/02/tanggal/19/id/673/> (11 Mei 2011)
- ALPTKI, 2009. *Pemikiran tentang Pendidikan Karakter dalam Bingkai Uuh Sistem Pendidikan Nasional*, Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
- Anonim. Bahan Penataran P4. Jakarta: BP 7
- Darmiyati Zuchdi. 2008. *Humanisasi Pendidikan : Menemukan Kembali Pendidikan Yang Manusiawi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Doni Koesoema A. 2007. *Pendidikan Karakter*, Jakarta: Grasindo.

- Kaelan. 2006. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kementrian Pendidikan Nasional .2010. *Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa*. Jakarta.
- Prayoga Bestari. 2010. *Pengembangan dan Pembinaan Karakter sebagai Aktualisasi Penguatan Budaya di Sekolah*. Bandung : Lab PKN UPI.
- Samsuri, 2009. "*Mengapa Perlu Pendidikan Karakter*", Makalah, disajikan pada *workshop* tentang Pendidikan Karakter oleh FISE UNY. Yogyakarta.
- Soemarno Soedarsono, 2009. *Karakter Mengantarkan Bangsa dari Gelap Menuju Terang*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Sofian Affendi. 2006. *Sambutan Rektor UGM Pada Simposium Nasional Pengembangan Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Nasional*. Prosiding : kerjasama UGM. Kagama.LIPI dan Lemhannas.
- Umar Anggara Jenie. 2006. *Sambutan LIPI Pada Simposium Nasional Pengembangan Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Nasional*. Prosiding : kerjasama UGM. Kagama.LIPI dan Lemhannas.
- Undang-Undang No. 20 Th . 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*

Surat Kabar

- Azyumardi Azra, Kompas 7 Mei 2011 : 1).
- Halili, Kompas 9 Mei 2011
- Komarudin Hidayat, Kompas 6 Mei 2011-05-11
- Kompas 10 Mei 2011.
- 12 mei 2011
- Seto Mulyadi, Kedaulatan Rakyat . 20 Februari 2011